



# Kenaikan Tarif Parkir Tertunda

## ■ Raperda Perparkiran Belum Tuntas Dibahas

### MENATA PARKIR

- Rencana menaikkan tarif parkir belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.
- Pasalnya, Raperda Perparkiran sebagai raperda induk belum selesai dibahas oleh DPRD Kota Yogyakarta.
- Nantinya, tarif parkir di titik-titik tertentu akan dinaikkan sesuai dengan kajian.
- Tujuan dari kenaikan tarif ini adalah menekan penggunaan kendaraan pribadi. Sehingga kemacetan bisa diminimalisasi.
- Nantinya pengelolaan perparkiran akan dikelola oleh satu badan atau instansi, sehingga tak menginduk di Dinas Perhubungan saja.
- Pital yang ditunjuk nantinya akan diminta membangun jokasi atau titik parkir baru.



**YOGYA. TRIBUN** - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perparkiran Kota Yogyakarta pesimistis rampung disusun hingga target Desember mendatang.

Pasalnya, rapat atau pembahasan Raperda di DPRD Kota Yogyakarta terus tertunda hingga tiga kali berturut-turut.

Ketua Pansus Raperda Perparkiran, Antonius Fokki Ardianto mengatakan, sejak Agustus hingga saat ini telah tiga kali rapat yang diagendakan batal dilaksanakan. Ia menyesali hal tersebut lantaran Raperda Perparkiran merupakan Raperda induk dari Raperda lainnya.



Di bawahnya itu ada dua Raperda turunan yang belum dibahas karena masih menunggu selesainya Raperda Perparkiran

Antonius Fokki A

GRAFIS/FALUZIA RAHMAN

● ke halaman 14

## Kenaikan Tarif Parkir

• Sambungan Hal 13

"Di bawahnya itu ada dua Raperda turunan yang belum dibahas karena masih menunggu selesainya Raperda Perparkiran. Kedua Raperda yakni, Raperda tentang Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan Raperda tentang Tempat Khusus Parkir (TKP)," jelas Fokki.

Politikus PDIP ini menjelaskan, Raperda perparkiran masih membahas berbagai hal, di antaranya terkait pengelolaan parkir satu atap, pendapatan pengelolaan parkir, dan penerapan sistem parkir elektronik atau *smart parking*. Draf Raperda sendiri berisi 30 pasal, namun progres pembahasan baru sampai pasal sembilan.

"Targetnya November rampung. Desember sosialisasi

sehingga Januari 2018 bisa langsung diterapkan. Tapi kalau lihat kondisi saat ini, susah," papar Fokki.

### Penataan

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi membenarkan bila ada wacana terkait kenaikan tarif parkir di Yogyakarta. Wacana tersebut masih satu bahasan terkait aturan perparkiran di DPRD Kota Yogyakarta.

"Dalam konteks benar-benar (tarif parkir) naik itu kan belum sampai ke situ. Tapi, memang wacana yang dimunculkan menaikkan tarif parkir terutama di daerah-daerah tertentu," ujar Heroe.

Ia mengatakan, wacana kenaikan parkir bertujuan untuk penataan parkir yang lebih baik atau memungkinkan baginya. Ke depan, pengelolaan parkir di Kota Yogyakarta akan di-

kelola oleh satu badan atau instansi.

"Sebetulnya kita susah menangani persoalan parkir secara keseluruhan sendirian. Selain itu, kita ingin masyarakat diberikan kesempatan juga untuk menyelenggarakan perpajakan," jelas Heroe.

Pihak yang ditunjuk nantinya, lanjut Heroe, ditarget membangun tempat parkir baru dan menata lokasi-lokasi parkir. Peralnya, bila pembangunan tempat parkir hanya mengandalkan anggaran dari APBD, maka membangun gedung parkir baru akan memakan waktu lama.

"Kalau ada keterlibatan swasta itu kan nanti bisa lebih cepat membangun itu (gedung parkir). Ini jangka panjang kita karena ke depannya bila pola perpajakan tertata. Maka bisa mengurangi parkir-parkir liar, itu

yang penting," urainya.

Pun, Heroe menambahkan, penataan parkir yang komprehensif mampu mengurangi juru parkir liar yang mematok harga tidak wajar atau *nutuk*. Pemkot Yogyakarta mewacanakan menggunakan sistem parkir elektronik atau *smart parking*, sehingga tarif telah ditentukan dan diawasi secara elektronik.

"Nanti juga kita mengembangkan penambahan CCTV (kamera pengawas) di tempat-tempat parkir sebagai pengawasan," pungkasnya.

Namun, wacana ini masih menjadi pembahasan panjang lantaran pihak eksekutif dan legislatif masih merapatkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perparkiran Kota Yogyakarta. Raperda ini ditarget rampung pada akhir tahun ini. (gii)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005